



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 April 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDDY NUR WACHID ACHADIONO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM SPESIALIS PROGRAM STUDI ILMU PENYAKIT DALAM
3. NHK : 1009009

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.178.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.260 m2/400 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 3.000.000.000		
2. Tanah Seluas 398 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 428.000.000		
3. Tanah Seluas 892 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	913.000.000
1. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
4. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 354.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	45.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.612.774.130
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	9.748.774.130

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.	1.170.000.000
Rp.	8.578.774.130

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.